

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DENGAN
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DI KECAMATAN
TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014-2015**

Dwi Sudaryanto

Email : dwi.sudaryanto@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Among 12 (twelve) sub-districts in the City of Pekanbaru, Tenayan Sub-Feast that most of the inhabitants of poor category. The aim of the research to know the City of Pekanbaru Government partnership with the Community Social workers in the sub-district Tenayan Feast of the City of Pekanbaru years 2014-2015 and to know the obstacles in Pekanbaru City Government partnership with the Community Social workers in the sub-district Tenayan Feast of the City of Pekanbaru Year 2014-2015. Data analysis methods used in this research is a qualitative descriptive analysis method that is attempting to expose the based on the existing phenomena and browse all the facts related to the issues discussed based on the results of research that is the partnership of the Government the City of Pekanbaru With Community Social workers in the sub-district Tenayan Feast of the City of Pekanbaru Year 2014-2015. Based on explanation on the discussion of the City Government Partnership with the Community Social workers in the sub-district Tenayan Feast of the City of Pekanbaru year 2014-2015, it can be concluded the partnership with City Government Community Social workers in the sub-district Tenayan Feast of the City of Pekanbaru Years shaped 2014-2015 mutualistik partnership which is the alliance of two or more parties are equally aware of the aspects of the importance of the partnership for mutual benefit and benefit more so that will be able to achieve optimal.

Key Words : The Partnership Pola, social workers Society, Government City of Pekanbaru

PENDAHULUAN

Sejak keluarnya kebijakan otonomi daerah yang dimulai dengan lahirnya dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah yang berorientasi

kepada kepentingan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan, akibatnya mereka mengalami kesulitan dan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, bagi PMKS persoalan yang mendasar adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, belum ada suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk terutama penduduk yang miskin dan rentan.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan” yang bertumpu kepada nilai-nilai luhur dan

prinsip-prinsip universal.

Menurut hasil pendataan yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Riau pada tahun 2004, Kota Pekanbaru menempati urutan terendah dalam jumlah penduduk miskin, yaitu 10.91%. Dari data yang dikeluarkan BPS Juni 2006, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru sebanyak 17.465 jiwa atau 8,23%, melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru telah dapat menurunkan angka kemiskinan sebagai berikut :

1. Data Kemiskinan Kota Pekanbaru tahun 2004 sebesar 10,08 %
2. Data kemiskinan Kota Pekanbaru tahun 2005 sebesar 9,08 %
3. Data Kemiskinan Kota Pekanbaru tahun 2006 sebesar 8,23 %

Sebagaimana komitmen Bapak Walikota Pekanbaru diawal jabatannya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,1 % dari jumlah penduduk miskin (data BPS tahun 2006) selama lima tahun jabatan Walikota 2006 – 2011 dari jumlah 17.465 penduduk miskin Kota Pekanbaru. Dalam program penanggulangan kemiskinan Walikota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2008, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Kota Pekanbaru.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai bagian dari strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru, antara lain :

1. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru, yang merupakan tindak lanjut dari pembentukan TKPK Pusat dan Provinsi Riau.
2. Memfungsikan Sekretariat Tim

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru.
3. Membentuk Komite Pengawasan Rumah Tangga Miskin (RTM) ditingkat Kota dan Kecamatan.
 4. Membuat Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru.
 5. Menugaskan Satuan Kerja Pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru, terdiri dari : BPMKB, Dinas Sosial dan Pemakaman, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kimpraswil dan KPIPT.
 6. Menugaskan Satuan Kerja Pendukung Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru, yang terdiri dari : Bappeda, Dinas Pasar, Dinas Pendaftaran Penduduk, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Satpol PP.
 7. Menggerakkan Partisipasi Swasta dan Masyarakat disetiap Kecamatan melalui Gerakan Cinta Keluarga Miskin (GENTAKIN).
 8. Melakukan Koordinasi dengan Dunia Usaha dalam rangka membantu Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru.
- Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui Program Dana Bergulir dengan membantu sebanyak 584 RTM. Semenjak tahun 2007 pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru telah terprogram melalui Dana APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp.7,5 Milyar untuk 604 RTM. Pada Tahun 2008 juga telah dianggarkan sebesar Rp.8,9 Milyar

untuk 790 RTM. Disisi lain Program Gerakan Cinta Keluarga Miskin (GENTAKIN) di setiap Kecamatan telah dapat membantu sebanyak 1.294 RTM.

Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, pada saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga banyak masyarakat pendatang yang datang ke kota ini dengan berbagai macam tujuan yaitu berdagang atau mencari kerja, namun ada juga yang dengan sengaja menjadi pengemis atau gepeng sehingga sangat sulit untuk mengurangi kemiskinan ini.

Sebagian penduduk miskin dikota Pekanbaru bukan orang asli daerah / orang melayu tetapi ada juga masyarakat pendatang. Sebagaimana layaknya kota-kota besar lainnya di tanah air, maka Pekanbaru juga mengalami permasalahan yang hampir sama. Tingginya tingkat urbanisasi, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin, dan terbatasnya dana APBD, merupakan serangkaian kendala yang dihadapi Pemerintah Kota dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di ranah ini.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Ibu Heriyani Kasi Dayasos Fakmis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, menyatakan jumlah penduduk miskin yang terbanyak di kota Pekanbaru diantara 12 (Dua Belas) Kecamatan yaitu berada di Kecamatan Tenayan Raya yaitu berjumlah 25.255 orang (data terlampir), dan dari 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kelurahan Sail yang terbanyak penduduk yang miskin.

Namun pada kenyataannya jumlah penduduk yang berada digaris kemiskinan terutama di Kecamatan

Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang merupakan termasuk kota transit yang berada di jalur Lintas Timur sebagai penghubung Kota dengan beberapa daerah luar lainnya baik itu dalam wilayah Propinsi Riau maupun di luar Propinsi Riau seperti Propinsi Jambi, Lampung maupun Palembang, sehingga sangat sulit untuk mengurangi kemiskinan karena banyak masyarakat pendatang dengan berbagai tujuan untuk datang ke kota Pekanbaru. Sebagai antisipasi Pemerintah terhadap lonjakan masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan, melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pasal 8 :

- (1) Ikatan PSM merupakan wadah berhimpunnya PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ikatan PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Kemudian pada Pasal 2, PSM diadakan dengan maksud untuk:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial.

Pasal 3, Tujuan diadakannya PSM:

- a. terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkesejahteraan sosial;

- b. terwujudnya warga masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan

- c. tertanganinya masalah sosial.

Upaya pengentasan kemiskinan terkait erat dengan pendekatan wilayah didukung pendekatan sektor dan reorientasi peran institusi pemerintah daerah serta pengendalian migrasi yang masuk ke Kota Pekanbaru. Apalagi untuk beberapa tahun ke depan, dimana pembangunan di segala bidang yang terjadi di Kota Pekanbaru akan mengundang lebih banyak lagi migrasi untuk datang ke Kota Pekanbaru ini. Bagi penduduk lokal yang tidak mampu bersaing justru akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan organisasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. IPSM adalah seorang yang warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta mengikuti bimbingan atau pelatihan dibidang kesejahteraan.

Status dalam IPSM adalah Independen, tidak berafiliasi politik maupun bersedia mendukung dan bekerja sama dengan berbagai lembaga organisasi, dalam usaha pembangunan bidang kesejahteraan sosial. IPSM merupakan wadah organisasi para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam kepedulian mereka membantu pemerintah mengatasi permasalahan sosial di Kecamatan Tenayan Raya.

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pola kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan

Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015. Untuk mengetahui hambatan kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015.

Studi Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat berguna bagi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini dibuat dengan mengacu penelitian terdahulu. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini masih menghasilkan penemuan yang berbeda-beda. Hal inilah salah satu penyebab permasalahan ini menarik untuk diteliti kembali.

Penelitian yang dilakukan Melyanti (2014 : 1) dengan judul “Pola Kemitraan Pemerintah, *Civil Society*, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo”. Hasil penelitian menyimpulkan pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah, civil society dan swasta tergolong dalam jenis pola kemitraan mutualistik. Untuk peran pemerintah, *civil society*, dan swasta secara umum mereka bersama-sama merencanakan dan melaksanakan. Secara khusus pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan *civil society* sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah.

Penelitian yang dilakukan Widayarsi (2008 :), dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Di Kelurahan Jomblang Kota Semarang”. Hasil penelitian diperoleh tingkat peran serta

masyarakat yang terjadi di Kelurahan Jomblang menurut kategori Arnstein dapat digolongkan pada tingkat Informing/Pemberian Informasi. Bentuk peran serta masyarakat ini dipengaruhi oleh lamanya tinggal. Hal ini dapat dilihat dari tabel probabilitas dengan nilai 0,003 dimana semakin banyak warga yang dikenal maka semakin kuat ikatan psikologis dengan lingkungannya. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, dimana tabel hasil probabilitas dengan nilai 0,045 karena mempengaruhi derajat aktivitas dalam kelompok dan mobilitas individu.

Penelitian lain juga dilakukan sebelumnya oleh Astuti (2006), dengan judul “Pola Kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam Implementasi Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) (Studi Kasus di Desa Segoro Tambak Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam penelitiannya tentang kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan program kemitraan pengembangan ekonomi lokal (KPEL) di Segoro Tambak tidak mampu memicu pertumbuhan usaha di desa tersebut.

Pemerintahan

Pengertian pemerintah secara etimologis menurut Syafiie (2007:15) sebagai berikut :

- a. Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.
- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Pemerintah berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (2005 : 12) dapat dirumuskan

sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

- a. Rasa Aman.
- b. Kesejahteraan
- c. Kebebasan
- d. Jati diri

Kemitraan

Menurut Hafsah (2009:43) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Adapun pola kemitraan menurut Sulistiyani (2010:130-131) diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut :

- a. *Pseudo partnership*
- b. *Mutualistik*
- c. *Konjugasi*

Sedangkan kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya adalah (Sulistiyani 2010:131-132) :

- a. *Subordinate union of partnership*
- b. *Linear union of partnership*
- c. *Linear collaborative of partnership*

Masyarakat

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2).Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Kemiskinan

Menurut Rajab (2004:20) berbagai pemerintah yang diajukan guna manggulangi kemiskinan selalu tersendat dan tidak efektif dikarenakan ; “Akses dan kontrol warga masyarakat miskin pada berbagai sumber kapital masih terbatas, sektor politik memang mengalami perubahan tetapi perubahan politik tersebut telah memunculkan berbagai konflik kepentingan dikalangan elit daerah dan pusat yang berusaha mempertahankan kontrol mereka pada sumber-sumber kapital dan enggan untuk membuka secara langsung sumber-sumber kapital itu untuk masyarakat miskin.”.

Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. (Sumarto, 2008: 1-2)

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber

informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya. (Iskandar, 2010:61).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, karena jumlah penduduk yang termasuk kategori miskin sangat banyak diantara 12 Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru.

3. Sumber Data

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian.

4. Jenis Data

Dalam setiap penulisan, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penulisan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer
2. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara.
- b. Observasi
- c. Studi Dokumen

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, maka analisis data disajikan dalam bentuk analisa. Data dikumpulkan melalui informan, informan penulisan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokan data menurut jenisnya. Data yang didapat dilapangan di dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

POLA KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DENGAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DI ECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2014- 2015

Kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong-royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. kerja sama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama.

Begitu juga dengan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru selaku lembaga sosial yang peduli dengan keadaan sosial di masyarakat terutama di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Berupaya semaksimal mungkin permasalahan tersebut,

tentunya dengan bantuan dari Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, saling bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan sosial yaitu terwujudnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara sosial dan peran masyarakat. Untuk mengetahui pola kemitraan Pemerintah Kota dengan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015. Pada bab ini penulis akan menguraikan segala hal yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru bersama Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu :

Dasar Hukum Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, harus berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, begitu juga dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru selaku instansi pemerintahan yang bertanggungjawab untuk mengatasi segala permasalahan sosial, dituntut untuk dapat melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk

menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.

Dari 13 (tiga belas) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) termasuk di dalamnya.

Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di atur dalam ketentuan Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat. Pada era awal delapan puluhan PSM yang kita kenal sebagai Pekerja Sosial Masyarakat adalah *Pembimbing Sosial Masyarakat* namun setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 28/HUK /1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat maka sejak itu PSM menjadi Pekerja Sosial Masyarakat dan dikenal dimasyarakat Indonesia yang berkedudukan sebagai salah satu pilar partisipan usaha

kesejahteraan sosial yang bersama-sama pilar partisipasi lainnya dan Pemerintah secara bertahap mewujudkan masyarakat yang berkejahteraan sosial.

Jadi inti dari kedua pengertian di atas apabila dikaitkan dengan Permensos RI No. 01 Tahun 2012 Pasal 3 di atas bahwa *social functioning* lebih cenderung dikaitkan dengan bagaimana interaksi orang dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini pekerjaan sosial mencoba membantu orang yang tidak atau kurang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupannya, memecahkan permasalahannya ataupun memenuhi kebutuhannya. Sehingga keberfungsian sosial dapat pula dilihat dari tiga kategori bahwa keberfungsian sosial dipandang sebagai kemampuan melaksanakan peranan sosial, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan sosial yang dialaminya.

Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pada Masalah Sosial

Kompleksitas permasalahan sosial yang berkembang dalam masyarakat menuntut upaya sadar dari setiap komponen masyarakat untuk memperbaharui dan mengelola sistem sosialnya serta menyelesaikan permasalahan sosialnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah upaya pengembangan nilai-nilai yang melandasi struktur sosial suatu masyarakat yang dinami, stabil dan mengacu pada tujuan pencapaian kesejahteraan sosial.

Maka berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut dapat disimpulkan pola kemitraan Pemerintah Kota dengan Pekerja Sosial Masyarakat di

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015 berbentuk kemitraan *mutualistik*. Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

Hambatan Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Pekerja Sosial Masyarakat Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat diuraikan beberapa indikator tentang hambatan kemitraan Pemerintah Kota dengan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015, yaitu :

1. Kebijakan Pemerintah
2. Jumlah PMKS Yang Terus
3. Perkembangan Teknologi dan Informasi Komunikasi
4. Kesiapan PSM Dengan Berbagai Penugasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan pola kemitraan Pemerintah Kota dengan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015

berbentuk kemitraan *mutualistik* yaitu merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

Hambatan kemitraan Pemerintah Kota dengan Pekerja Sosial Masyarakat Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015, adalah : Kebijakan Pemerintah, jumlah pmks yang terus meningkat dan berkembang, perkembangan teknologi dan informasi komunikasi, dan kesiapan PSM dengan berbagai penugasan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tentang Pola Kemitraan Pemerintah Kota dengan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015, adapun hal-hal perlu disarankan untuk mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan akses jalan yang baik di seluruh wilayah kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Tenayan Raya, karena dalam melaksanakan tugasnya para PSM sangat kesulitan menjangkau daerah-daerah terpencil di kota Pekanbaru terutama di wilayah Kecamatan Tenayan Raya, masih banyak jalan-jalan di daerah tersebut belum di aspal, apalagi pada saat hujan akses kesana menjadi terkendala.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru, menyiapkan anggaran khusus bagi Pekerja Sosial Masyarakat, agar segala permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dengan segera tanpa menunggu anggaran

keluar atau disyahkan.

3. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru, menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan PSM dalam melaksanakan tugasnya seperti kendaraan roda empat maupun roda dua dan sarana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Amin, Yusman. 2014. *Kebijakan, Program Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Kepala Bappeda Kota Pekanbaru dalam acara lokakarya orientasi PNPM-MP Kota Pekanbaru.
- Arsyad, Lincolin. 2005. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Biro Pusat Statistik Indonesia, 2011. *Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2011*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
- Bintarto, R, 2007, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta ; Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bobo, Julius, 2010, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta : PT. Pustaka. Cidesindo
- Dede Rosyada Dkk, 2010. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Hafsah, Muhammad Jafar. 2009. *Kemitraan Usaha*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Iskandar, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* :

Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta
: Penerbit GP Pres.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Mahmudi. 2007. *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik*. Vol.9 No.1

Mulyono, M., 2006. *Penerapan Produktivitas, Dalam Organisasi*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Nasikun, 2005, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Riduwan, 2010, *Rumus dan Data Dalam Aplikasi Statistika Untuk Penelitian : Administrasi Pendidikan, Bisnis, Pemerintahan, Sosial, Kebijakan, Ekonomi, Hukum, Manajemen dan Kesehatan*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Ritonga, Hamonangan. 2006. *Perkembangan Indikator Kemiskinan dan Ketengakerjaan Tahun 2004 dan Perkiraan Tahun 2005-2006*. Journal of Quarterly Review of The Indonesian Economy. Vol 7 (1). January 2006.

Sumarto Hetifa Sj, 2008. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung : Yayasan Obor Indonesia.

Suyanto, Bagong, 2005. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya*, Surabaya : Universitas Airlangga Press.

Syafiie, Inu, Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. PT.

Perca. Jakarta.

Soekidjo, Notoatmodjo, 2010. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta,

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2010. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta:Gava Media.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Todaro, Michael P, 2006, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedua, Terjemahan Haris Munandar, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Jurnal :

Astuti, Nurareni Widi. 2006. *Pola Kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam Implementasi Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) (Studi Kasus di Desa Segoro Tambak Kabupaten Sidoarjo)*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Melyanti Merry Imelda. 2014. *Jurnal : Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Airlangga. Kebijakan

dan Manajemen Publik Volume 2,
Nomor 1, Januari 2014 ISSN
2303 - 341X.

Widyasari Puspita Indriana. 2008. *Tesis : Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Di Kelurahan Jomblang Kota Semarang*. Semarang : Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Dokumen :

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi
dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor : 1 Tahun 2012
tentang Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM)

Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun
2008, tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan Kota
Pekanbaru.